

DRAFT LAPORAN AKHIR

Kabupaten

MASTER PLAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015-2030



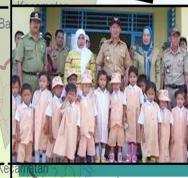
Kabupaten Lampung Utara

> Kecamatan Kebun Tebu

Kabupaten Lampung Tengah







Kabupaten Tanggamus







MITTP://BAPPEDA.LAMPUNGBARATKAB.GO.ID/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

TIM PENYUSUN

Ketua

: Dr. Erlina Rufaidah, M.Si.

Sekertaris

: Dr. Abdurrahman, M.Si

Anggota 1

: Prof. Dr. H. Bujang rahman, M.Si.

Anggota 2

: Drs. Budi Kadaryanto, M.Sc

Anggota 3

:Dra. Diah Utaminingsih, M.Pd

TIM PEMBANTU

- 1. Deris Astriawan S.Pd.
- 2. Dedi Hardiansyah
- 3. Ghea Chandra, S.Pd
- 4. Ervinggo Fasya Jaya Sp
- 5. Emi Rodhiyatun, S.Pd
- 6. Afdi Rasyid Ikhprastyo
- 7. Tyas Abror Huda, S.Pd
- 8. Nun Adiyah
- 9. Rohmah Wahyudi
- 10. Novie Setyowati

Bandar Lampung, 18 Desember 2017 Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP

ersitas Lampung

Abdurrahman, M.Si

196812101993031002

Kata Pengantar

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Draft Akhir Master Plan Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Adapun tujuan penyusunan dokumen Master Plan ini adalah untuk memberikan gambaran yang spesifik mengenai profil pendidikan dasar berikut dengan strategi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat.

Laporan akhir ini terdiri dari 5 bab yang meliputi Pendahuluan, Profil Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Barat, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar Tahun 2015-2025, dan Penutup.

Akhir kata, tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan turut membantu dalam penyusunan Draft Akhir Master Plan Pendidikan Dasar ini. Semoga dokumen ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat pada khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya.

Lampung Barat, Agustus 2015

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAD I DENIDATITI HANI	1
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Tujuan	4
1.3. Sasaran dan Manfaat	
1.4. Keluaran yang Diharapkan	
1.5. Ruang Lingkup	
1.6. Arah Kebijakan Pendidikan Nasional	
1.7. Dasar Hukum	
1.8. Metode Penyusunan Master Plan Pendidikan	8
BAB II. PROFIL PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN LAMPU	ING
BARAT	
2.1. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Lampung Barat	
2.1.1. Administrasi Pemerintahan Daerah	
2.1.2. Demografi	
2.2. Kondisi Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Barat	
2.2.1. Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA)	
2.2.2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)	
2.2.3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP)	
2.3. APS, APM, dan APK Menurut Jenjang Pendidikan	11115)
di Kabupaten Lampung Barat	20
2.3.1. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lampung Barat	
2.3.2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan	
Angka Partisipasi Kasar (APK)	21
mgka i arusipasi ikasar (mix)	21
BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	23
3.1 Visi dan Misi Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Barat	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	33
BAB IV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNA	A NT
PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015-2025	
4.1. Strategi Pencapaian Tujuan	
4.2. Strategi Umum	
4.3. Arah Kebijakan	43
4.4. Sasaran Strategis, Kebijakan Strategis,	
Program Prioritas serta Tahapan Pencapaian Tahunan	, -
Selama Tahun 2015-2025	49
DAD W DENILIPLID	5 0
BAB V. PENUTUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Jumlah Sekolah TK/RA Per Kecamatan	11
Gambar 2.2. Jumlah Guru TK/RA Per Kecamatan	12
Gambar 2.3. Distibusi Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa TK/RA	
Per Kecamatan	12
Gambar 2.4. Jumlah Sekolah SD/MI Per Kecamatan	14
Gambar 2.5. Jumlah Guru SD/MI Per Kecamatan	14
Gambar 2.6. Jumlah Guru SD/MI Per Kecamatan	14
Gambar 2.7. Distribusi Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa	
Sekolah Dasar Negeri (SDN) Per Kecamatan	14

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung	
	Menurut Kelompok Umur Tahun 2014	10
Tabel 2.2.	Distibusi Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa TK/RA	11
Tabel 2.3.	Distribusi Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa	
	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	13
Tabel 2.4.	Distribusi Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa	
	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Status Per Kecamatan	16
Tabel 2.5.	Distribusi Siswa MI Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Tabel 2.6.	Distribusi Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa	
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	
Tabel 2.7.	Distribusi Siswa SMP Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Tabel 2.8.	Distribusi Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa	
	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	19
Tabel 2.9.	Distribusi Siswa MTs Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Tabel 2.10.	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lampung Barat	21
Tabel 2.11.	Angka Angka Partisipasi Murni (APM) dan	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang	
	Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat	21

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, Pasal 31 yang menyatakan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistempendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka menghidupkan kecerdasan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pandapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sejalan dengan pasal 31, pasal 28 C ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya melalui UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SisDikNas) semakin memperkuat dasar hukum pendidikan nasional Indonesia. UU SisDikNas tersebut menyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Hanya dengan pendidikan yang berkualitas akan dihasilkan insan cendekia berkualitas yang akan berkontribusi besar terhadap kemajuan bangsa.

Cita-cita luhur untuk membangun masyarakat Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing Internasional telah diupayakan oleh pemerintah, salah satunya dengan rancangan program pembangunan jangka panjang. Dewasa ini rencana pembangunan nasional telah memasuki periode 2015-2020 yang difokuskan pada peningkatkan daya saing regional khususnya pada tingkat ASEAN dengan

didasarkan pada standar benchmarking yang objektif dan realistis. Harapan Indonesia pada akhir periode ini sudah bisa menjadi titik pusat gravitasi sosial ASEAN sebagai sebuah entitas sosio kultural termasuk didalamnya menjadi acuan pendidikan nasional yang berkualitas. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dan untuk mencapai target pembangunan nasional di periode 2020-2025, pemerintah telah mencanangkan pencapaian nilai kompetitif secara internasional pada bidang pendidikan. Berbagai program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tentunya harus bersinergi dengan keberhasilan pendidikan pada level daerah baik tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Tolak ukur keberhasilan berada pada bagaimana cara untuk mengejewantahkan berbagai kebijakan strategis di bidang pendidikan baik pada saat proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang berkesinambungan sesuai dengan kondisi daerah yang ada agar tercapai kondisi yang dicita-citakan sehingga terwujud insan cerdas Indonesia yang mampu berkompetitif baik pada tingkat lokal, regional, dan global.

Penjelasan akan upaya-upaya pemerintah dan kekuatan hukum yang mengatur kebijakan pendidikan di Indonesia menyiratkan akan betapa pentingnya peran pendidikan dalam membangun peradaban bangsa. Seyogyanya, pendidikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang sejahtera dan berkeadilan. Berhasilnya cita-cita pendidikan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi ditingkat provinsi, kota, dan kabupaten.

Pendidikan dasar merupakan salah satu bagian penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan di sekolah dasar merupakan faktor yang sangat penting dikarenakan pada tingkat sekolah dasar inilah, pondasi perkembangan kemampuan berpikir dan belajar anak berpengaruh dan mempengaruhi pada jenjang yang selanjutnya. Artinya, perkembangan mental, fisik, serta inteligensi anak terpusat pada usia antara 0 tahun sampai dengan 12 tahun. Masa-masa tersebut merupakan masa keemasan bagi pertumbuhan anak, baik fisik maupun psikisnya. Oleh karenanya, dimasa sekolah dasar, perlu diupayakan kepada anak agar dapat leluasa untuk menerima pengetahuannya dengan sebaik-sebaiknya dan sebenar-benarnya. Lingkungan sekolah adalah tempat yang sangat berpengaruh terhadap potensi perkembangan belajar anak sekolah dasar ke ranah yang lebih baik seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap tujuan pendidikan di sekolah dasar maupun di sekolah lanjutan dapat terwujud. Pendidikan dasar yang baik akan menentukan pendidikan pada level menengah dan penddikan tinggi. Selanjunya, majunya pendidikan dasar baik ditingkat kabupaten, kota, dan

provinsi akan menjadi bagian yang integral dan berkontribusi besar terhadap pendidikan nasional di Indonesia.

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung dengan luas area 2141,57 km² dan jumlah total penduduk hingga tahun 2013 mencapai 287.588 jiwa yang terbagi atas 152.979 jiwa laki-laki dan 134.609 jiwa perempuan. Selanjutnya diantara jumlah total penduduk di Kabupaten Lampung Barat, jumlah penduduk yang berusia 5-9 tahun berjumlah 26.635 jiwa dan yang berusia 10-14 tahun berjumlah 24.400 dimana idealnya jumlah ini merupakan penduduk yang harus mengikuti wajar dikdas 9 tahun di Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah melalui Kepres Nomor 5 Tahun 2006 telah mendorong percepatan penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan pemberantasan buta aksara. Menurut Profil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013, Kabupaten Lampung Barat telah berhasil melaksanakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pendidikan dasar melalui program wajib belajar 9 tahun. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa persentase penduduk tahun yang bersekolah di SD/MI atau Angka Partisipasi Murni SD/MI (APM SD/MI) pada tahun 2013 mencapai angka 93,67%. Sedangkan bila dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), APK SD/MI Kabupaten Lampung Barat tahun 2013 sebesar 106,52%. Nilai APM dan APK ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Lampung Barat pada wajar dikdas sudah cukup baik.

Disamping pemerataan kesempatan pendidikan, perlu ditinjau sisi lain dari pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat seperti mutu pendidikan dasar, ketersediaan sarana prasarana penunjang pendidikan dasar, ketersediaan guru dan staf, kualitas guru sekolah dasar, implementasi kurikulum pendidikan dasar, profil lulusan, dan sebagainya. Keberhasilan pendidikan dasar tentunya akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terkait berbagai sisi penunjang pendidikan dasar demi tercapaikan pendidikan dasar Kabupaten Lampung Barat yang berkarakter, unggul, dan berdaya saing.

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam mengatasi permasalahan dan mengeksplorasi potensi pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat, maka dipandang perlu menyusun *Master Plan* Pendidikan Dasar. Rancangan *Master Plan* dibuat dengan memperhatikan visi dan misi Kabupaten Lampung Barat dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang yang menekankan pada tiga pilar yaitu: (1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; (3) Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik. Adapun visi pendidikan Kabupaten Lampung Barat adalah

pendidikan yang berkarakter, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan dan pelaksanaan program pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat periode 2015-2025 diharapkan dapat menghasilkan insan-insan cerdas dan berkarakter. Agar tujuan Penyusunan *Master Plan* dapat dicapai dengan efektif maka pengembangan program perlu didasarkan pada persoalan-persoalan prioritas yang secara substantif memiliki peluang lebih besar untuk berkembang baik dari aspek kuantitatas maupun kualitasnya. Oleh karena itu,dalam upaya pencapaian visi Kabupaten Lampung Barat (Lampung Barat Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa) dipandang perlu mengembangkan program-program yang bersifat inovatif. Dengan demikian, perlu disusunnya kerangka program pendidikan dasar yang utuh dan rinci dalam bentuk *Master Plan* Pendidikan Kabupaten Lampung Barat periode 2015 - 2025.

1.2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka *Master Plan* Pendidikan Kabupaten Lampung Barat secara khusus bertujuan, sebagai berikut:

- a. Menyusun dokumen Rencana Induk (*Master Plan*) Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015-2025 sebagai pedoman pengembangan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat.
- b. Memberikan pedoman dan arah dalam meningkatkan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pendidikan.

1.3. Sasaran dan Manfaat Penyusunan Master Plan Pendidikan

Sasaran dari penyusunan Buku Master Plan Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Barat ini adalah

- a. Mengetahui mutu dan relevansi pendidikan dasar di Kab. Lampung Barat
- Mengetahui berbagai potensi dan sarana pendukung upaya peningkatan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat
- Mengetahui faktor-faktor penghambat upaya peningkatan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat
- d. Mengetahui permasalahan prioritas yang akan dicarikan solusinya berkaitan dengan upaya peningkatan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat
- e. Adanya rumusan kebijakan strategis yang dapat dijadikan sebagai solusi alternatif dalam upaya peningkatan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat

- f. Mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan nyata bagi pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat
- Mendeskripsikan pemerataan dan perluasan pendidikan dasar di seluruh wilayah bagian Kabupaten Lampung Barat
- h. Mendeskripsikan pemberdayaan peran serta orang tua dan masyarakat dan/atau komite sekolah.

1.4. Keluaran yang Diharapkan

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan penyusunan *Master Plan* Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat ini, ialah tersusunnya dokumen perencanaan pendidikan dasar untuk tahun 2015-2025, yang berisi:

- a. Gambaran permasalahan,tantangan, dan potensi pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat hingga tahun 2025.
- b. Sasaran manajemen pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat hingga tahun 2025.
- Kebijakan strategis dan arah pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat sampai Tahun 2025.
- d. Program-program prioritas yang perlu dikembanngkan untuk peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat sampai Tahun 2025.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penyusunan *Master Plan* Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat ini meliputi:

- Analisis tentang kondisi riil perkembangan dan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat hingga tahun 2015, yang mencakup: (a) profil dan kualitas lulusan, (b) ketersediaan dan kualitas guru sekolah dasar, (c) analisis ketersediaan SD/MI, (d) ketersediaan sarana prasarana penunjang pendidikan dasar, (e) analisis pemerataan kesempatan pendidikan dasar
- Analisis tentang tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat sampai Tahun 2025;
- 3. Analisis tentang kebijakan strategis dan arah pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat hingga tahun 2025;
- 4. Analisis program-program prioritas yang perlu dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat hingga tahun 2025.

1.6. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bemokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma kapasistas membangun manusia Indonesia seutuhnya agar memiliki mengaktualisasikan potensi kemanusiaan secara optimal. Tiga hal mendasar potensi kemanusiaan yang perlu dikembangkan, yaitu (1) afektif (sikap) yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (2) kognitif (kecerdasan intelektual) yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik (keterampilan praktis) yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan dan kompetensi kinestetik.

Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan nasional Indonesia yang berkualitas, Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan Visi Pendidikan Nasional yaitu "Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah".

Dari Visi yang telah dicanangkan kemudian dibuat beberapa Misi Pendidikan Nasional yang harus dicapai dalam beberapa tahun kedepan yaitu: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan (e)

memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Kemdikbud melalui visi pembangunan pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas adalah: (a) ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD berkualitas; (b) ketersediaan, keterjangkauan dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan dasar berkualitas; (c) ketersediaan dan keterjangkauan layanan menengah yang berkualitas dan relevan; (d) ketersediaan dan keterjangkauan layanan tinggi berkualitas, relevan dan berdaya saing internasional; (e) ketersediaan dan keterjangkauan layanan orang dewasa berkelanjutan; dan (f) ketersediaan system tata kelola yang handal. Tujuan strategis inilah yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam masterplan pendidikan Kabupaten Lampung Barat sesuai kondisi yang ada di kota ini.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Nasional, kemudian dapat diperoleh tiga kunci arah penting pendidikan Indonesia yang harus dijadikan orientasi utama untuk menjawab masalah dan tantangan Indonesia ke depan, yaitu pembentukan akhlak atau karakter bangsa, pengembangan ipteks (ilmu pengetahuan teknologi dan seni), dan penyiapan tenaga kerja berbasis sumber daya alam Indonesia.

1.7. Dasar Hukum

Master Plan Pendidikan Kabupaten Lampung Barat disusun atas dasar hukum yang kuat. Dasar hukum di samping memberi aspek legal juga memberikan gambaran tentang komponen apa saja yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar nasional, regional maupun lokal yang berlaku. Landasan hukum penyusunan masterplan Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Menuju Tahun 2025 adalah:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 9. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
- 11. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 16. Perda Kabupaten Lampung Barat tentang Pendidikan Dasar;

1.8. Metode Penyusunan Master Plan Pendidikan

Kegiatan penyusunan *Master Plan* Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Barat ini terdiri dari empat tahap, yakni pengumpulan data, penghimpunan data, analisa data, dan penyimpulan hasil kajian yang akhirnya bermuara pada perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan *Master Plan* pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat.

Jenis data dalam kajian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer kajian terkait dengan data-data yang terfokus pada informasi mengenai kondisi *Master Plan* pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat saat ini serta berbagai faktor penunjang dan berbagai faktor yang menjadi kendala upaya peningkatan *Master Plan* pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan data sekundernya adalah berupa data atau informasi pendukung yang dapat dijadikan sebagai pengayaan materi atau fokus kajian.

Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung kepada beberapa dinas instansi terkait di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Pengumpulan Data Sekunder dilakukan melalui pengumpulan data yang terdapat pada buku, laporan-laporan, jurnal ilmiah ataupun sumber kepustakaan lainnya yang diperoleh dari instansi terkait maupun sumber pustaka lainnya. Data primer dalam hal ini diperlukan untuk mendalami problematika pendidikan hingga mendapatkan langkah solutif yang terbaik dalam kerangka menyusun Rencana Induk Pembangunan (RIP) bidang pendidikan.

BAB II. PROFIL PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN LAMPUNG BARAT

2.1. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Lampung Barat

2.1.1. Administrasi Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan UU. No. 32 tahun 2004, pemerintah daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Lampung Barat sebagai kesatuan wilayah pemerintahan, telah memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan terpadu, termasuk di bidang pendidikan. Hal itu berarti bahwa rencana pembangunan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kabupaten maupun provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Barat harus berada dibawah koordinasi atau sepengetahuan pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan, yakni: (1) Balik Bukit; (2) Sukau; (3) Belalau; (4) Sekincau; (5) Suoh, (6) Batu Brak, (7) Sumber Jaya, (8) Way Tenong, (9) Gedung Surian, (10) Way Krui, (11) Krui Selatan, (12) Lumbok Seminung, (13) Bandar Negeri Suoh, (14) Pagar Dewa, (15) Batu Ketulis, (16) Air Hitam, dan (17) Kebun Tebu.

2.1.2. Demografi

Berdasarkan undang-undang, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara optimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspekaspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Barat (2014), Kabupaten

Lampung Barat dihuni jumlah total penduduk hingga tahun 2013 mencapai 287.588 jiwa yang terbagi atas 152.979 jiwa laki-laki dan 134.609 jiwa perempuan. Pada tahun 2000 (Sensus Penduduk 2000) penduduk Kabupaten Lampung Barat adalah sebanyak 364.989 jiwa, tahun 2010 jumlah penduduk meningkat menjadi 419.037, namun pada tahun 2013 jumlah penduduk berkurang menjadi 287.588. Ini menunjukkan ada trend peningkatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Barat antara tahun 2000-2010 dan kemudian adanya penurunan laju pertumbuhan penduduk antara tahun 2010-2013. Laju pertumbuhan dan pengurangan jumlah penduduk ini disebabkan faktor migrasi penduduk dan faktor kelahiran yang cukup signifikan di Kabupaten Lampung Barat.

Jika dilihat dari sebaran umur penduduk maka dapat dikelompokkan yaitu kelompok umur 5-9 tahun, 15-19 tahun, 20-24 tahun dan 25-29 tahun. Seperti halnya Sensus Penduduk 2000, komposisi penduduk menurut kelompok umur dari hasil Sensus Penduduk 2010 tidak jauh berbeda, di mana penduduk banyak mengelompok pada kelompok umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Dengan demikian dapat diduga bahwa migrasi masuk ke Kabupaten Lampung Barat banyak terjadi pada kelompok umur ini. Jika dilihat dari sebaran usia wajib belajar pendidikan dasar maka diperoleh bahwa jumlah angka kelahiran di Kabupaten Lampung Barat cukup besar sehingga hal ini juga perlu dipertimbangkan untuk menyusun rencana pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kelompok Umur Tahun 2014

Wahunatan/Wata		Kelompok Umur						
Kabupaten/ Kota	0-14	15-64	65+	Total				
Lampung Barat	127.547	276.610	14 880	419 037				
Tanggamus	161.069	349.814	25 730	536 613				
Lampung selatan	278.933	589.888	43 669	912 490				
Lampung Timur	272.619	621.653	57 367	951 639				
Lampung Tengah	334.343	768.803	67 571	1 170 717				
Lampung Utara	179.624	377.657	26 996	584 277				
Way kanan	122.668	264.687	18 768	406 123				
Tulang Bawang	124.701	259.328	13 877	397 906				
Pesawaran	119.947	258.359	20 542	398 848				
Pringsewu	106.252	237.590	21 527	365 369				
Mesuji	56.176	122.404	8 827	187 407				
Tulang Bawang Barat	72.807	164 698	13 202	250 707				
Bandar Lampung	244.723	606 898	30 180	881 801				
Metro	39.148	99 731	6 592	145 471				
Total Penduduk	2.240.557	4 998 120	369 728	7 608 405				
Lampung								

2.2. Kondisi Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Barat

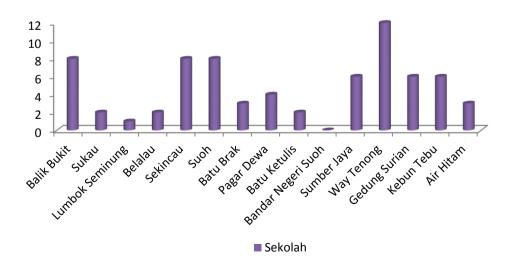
2.2.1. Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA)

Kabupaten Lampung Barat memiliki 71 Sekolah pada jenjang TK/RA, yang tersebar di 14 kecamatan. Jumlah siswa yang berada di TK/RA tahun 2014 ini mencapai 2594 siswa. Dimana jumlah siswa terbanyak ada di TK/RA wilayah Kecamatan Balik Bukit yang mencapai 769 siswa, sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Lumbok Seminung dengan 27 siswa. Dari Tabel 2.2 hanya kecamatan Bandar Negeri Suoh yang tidak memiliki sekolah pada jenjang TK/RA.

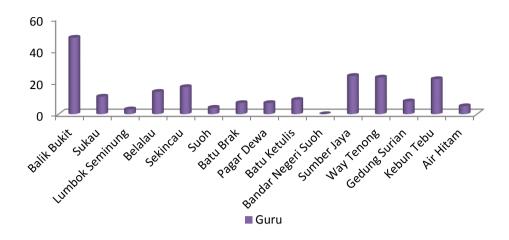
Tabel 2.2. Distibusi Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa TK/RA Berdasarkan Kecamatan di Lampung Barat Tahun 2014

Recamatan di Lampung Darat Tanun 2014								
No	Kecamatan		Jumlah					
110	Kecamatan	Sekolah	Guru	Siswa				
1	Balik Bukit	8	48	769				
2	Sukau	2	11	120				
3	Lumbok Seminung	1	3	27				
4	Belalau	2	14	72				
5	Sekincau	8	17	253				
6	Suoh	8	4	239				
7	Batu Brak	3	7	126				
8	Pagar Dewa	4	7	44				
9	Batu Ketulis	2	9	35				
10	Bandar Negeri Suoh	-	-	-				
11	Sumber Jaya	6	24	281				
12	Way Tenong	12	23	207				
13	Gedung Surian	6	8	185				
14	Kebun Tebu	6	22	196				
15	Air Hitam	3	5	40				
Jum	lah/Total 2013/2014	71	202	2594				

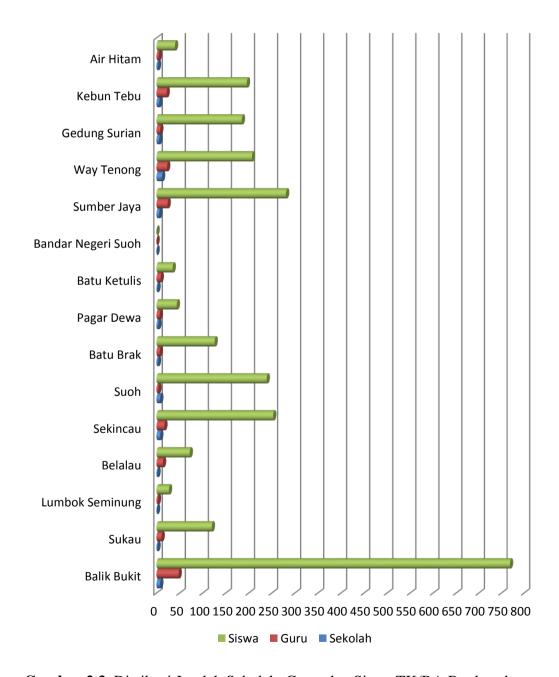
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, 2014



Gambar 2.1. Jumlah Sekolah TK/RA Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat 2014



Gambar 2.2. Jumlah Guru TK/RA Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat 2014



Gambar 2.3. Distibusi Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa TK/RA Berdasarkan Kecamatan di Lampung Barat Tahun 2014

2.2.2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)

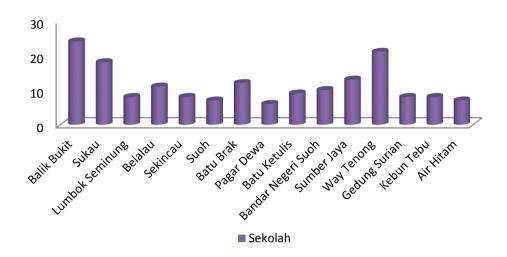
Secara umum, Kabupaten Lampung Barat memiliki 170 Sekolah Dasar Negeri (SDN), tiga Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), dan 30 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MI). Berdasarkan Tabel 2.3 Kabupaten Lampung Barat memiliki 170 Sekolah pada jenjang SD dengan status negeri yang kemudian disebut SDN. Jumlah siswa SDN tahun 2014 ini mencapai 793.637 siswa. Dimana jumlah siswa terbanyak ada di SDN wilayah Kecamatan Balik Bukit yang mencapai 4529 siswa, sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Lumbok Seminung dengan 766 siswa.

A. Sekolah Dasar Negeri (SDN)

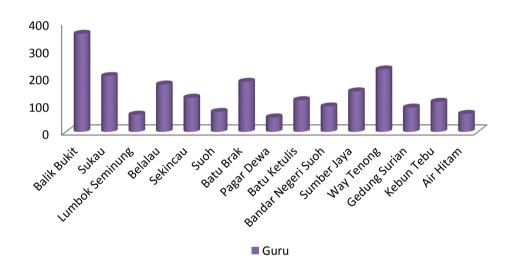
Tabel 2.3. Distribusi Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Berdasarkan Kecamatan di Lampung Barat Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah					
110	Kecamatan	Sekolah	Guru	Siswa			
1	Balik Bukit	24	358	4529			
2	Sukau	18	204	2394			
3	Lumbok Seminung	8	63	766			
4	Belalau	11	173	1064			
5	Sekincau	8	125	1839			
6	Suoh	7	73	1286			
7	Batu Bak	12	183	1370			
8	Pagar Dewa	6	53	1047			
9	Batu Ketulis	9	116	1378			
10	Bandar Negeri Suoh	10	93	1527			
11	Sumber Jaya	13	148	2719			
12	Way Tenong	21	228	3671			
13	Gedung Surian	8	89	1578			
14	Kebun Tebu	8	110	2102			
15	Air Hitam	7	66	1133			
Jum	lah/Total 2013/2014	170	2082	793.637			

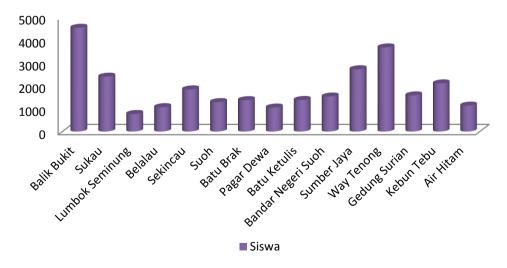
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, 2014



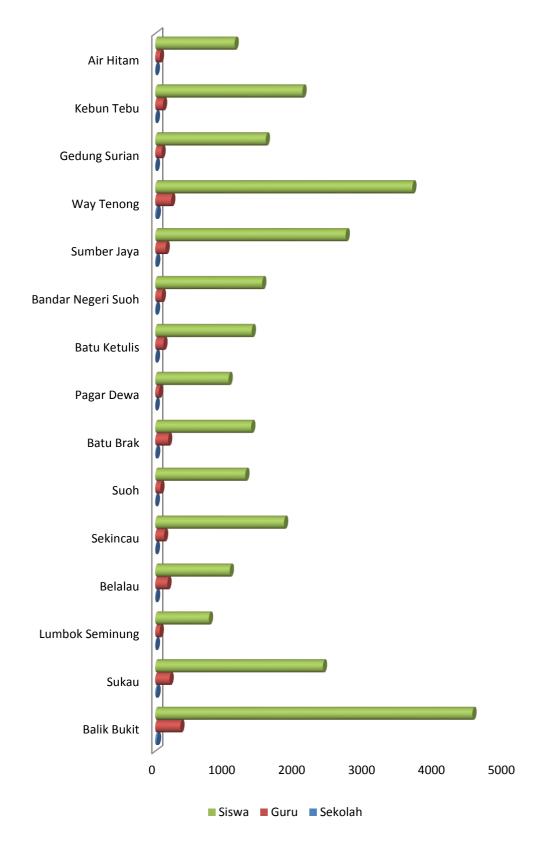
Gambar 2.4. Jumlah Sekolah SD/MI Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat 2014



Gambar 2.5. Jumlah Guru SD/MI Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat 2014



Gambar 2.6. Jumlah Guru SD/MI Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat 2014



Gambar 2.7. Distribusi Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Berdasarkan Kecamatan di Lampung Barat Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2.4 Hanya ada tiga kecamatan yang memiliki Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yaitu Balik Bukit, Sukau, dan Belalau. Di mana jumlah siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tahun 2014 ini mencapai 668 siswa. Jumlah siswa terbanyak ada di wilayah Kecamatan Sukau yang mencapai 307 siswa, sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Balik Bukit dengan 122 siswa. Untuk MI dengan status swasta (MIS), hampir tersebar ke semua kecamatan di Lampung Barat hanya lima kecamatan yang tidak memiliki MIS yaitu Balik Bukit, Lumbok Seminung, Batu Brak, Batu Ketulis, dan Kebun Tebu. Di mana jumlah siswa MIS tahun 2014 mencapai 2613 siswa. Jumlah siswa terbanyak ada di wilayah Kecamatan Bandar Negeri Suoh yang mencapai 719 siswa, sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Pagar Dewa dengan 36 siswa.

Tabel 2.4. Distribusi Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Status Per Kecamatan di Lampung Barat Tahun 2014

No	Kecamatan Kecamatan		Negeri			Swasta	
		Sekolah	Guru	Siswa	Sekolah	Guru	Siswa
1	Balik Bukit	2	20	122	-	-	-
2	Sukau	1	21	307	3	29	226
3	Lumbok Seminung	-	-	-	-	-	-
4	Belalau	1	19	239	1	10	77
5	Sekincau	-	-	-	3	33	292
6	Suoh	-	-	-	4	52	288
7	Batu Bak	-	-	-			
8	Pagar Dewa	-	-	-	1	6	32
9	Batu Ketulis	-	-	-			
10	Bandar Negeri Suoh	-	-	-	8	86	719
11	Sumber Jaya	-	-	-	2	29	315
12	Way Tenong	-	-	-	4	36	338
13	Gedung Surian	-	-	-	1	12	128
14	Kebun Tebu	-			-	-	
15	Air Hitam	_	_	-	3	30	194
Tota	al	3	60	668	30	323	2613

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, 2014

Tabel 2.5. Distribusi Siswa MI Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014

No	Vacamatan		Negeri		Swasta		
No	Kecamatan	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
1	Balik Bukit	63	59	122			
2	Sukau	160	147	307			
3	Lumbok						
	Seminung						
4	Belalau	125	114	239			
5	Sekincau						
6	Suoh						
7	Batu Bak						
8	Pagar Dewa						
9	Batu Ketulis						
10	Bandar Negeri						
	Suoh						
11	Sumber Jaya						
12	Way Tenong						
13	Gedung Surian						
14	Kebun Tebu						
15	Air Hitam						
Jum	lah	348	320	668			

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, 2014

2.2.3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)

Secara umum, Pada Jenjang SMP/MTs di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 43 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP), 1 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan 19 Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs). Berikut ini adalah data distribusi jumlah sekolah, guru dan siswa pada jenjang SMP/MTs:

Tabel 2.6. Distribusi Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Status Per Kecamatan di Lampung Barat Tahun 2014

No	Kecamatan		Negeri		Swasta			
110	Kecamatan	Sekolah	Guru	Siswa	Sekolah	Guru	Siswa	
1	Balik Bukit	6	150	2206	1	6	41	
2	Sukau	4	50	535	1	15	72	
3	Lumbok	4	16	366				
	Seminung							
4	Belalau	1	25	485				
5	Sekincau	2	45	792	1	15	110	
6	Suoh	2	23	393	2	31	274	

7	Batu Brak	2	38	380			
8	Pagar Dewa	3	16	388	1	14	151
9	Batu Ketulis	3	17	224			
10	Bandar Negeri	3	24	404	3	16	304
	Suoh						
11	Sumber Jaya	3	49	972			
12	Way Tenong	4	92	1084			
13	Gedung	2	34	585			
	Surian						
14	Kebun Tebu	2	42	751			
15	Air Hitam	2	31	399			
Jumlal	1	43	652	66772	9	97	952
				9			

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, 2014

Berdasarkan Tabel 2.6 semua kecamatan memiliki Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), di mana jumlah siswa SMPN tahun 2014 ini mencapai 667729 siswa. Jumlah siswa terbanyak ada di wilayah Kecamatan Balik Bukit dengan 2206 siswa, sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Batu Ketulis dengan 224 siswa. Untuk SMP dengan status swasta (SMPS), hanya tersebar di enam kecamatan yaitu Balik Bukit, Sukau, Sekincau, Suoh, Pagar Dewa, dan Bandar Negeri Suoh. Di mana jumlah siswa SMPS tahun 2014 mencapai 952 siswa. Jumlah siswa terbanyak ada di wilayah Kecamatan Bandar Negeri Suoh yang mencapai 304 siswa, sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Balik Bukit dengan 41 siswa. Selengkapnya distribusi siswa MI disajikan pada Tabel 8

Tabel 2.7. Distribusi Siswa SMP Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014

	ampung burut runun 2014									
No	Kecamatan	N	Negeri		asta	Jumlah				
NO	Kecamatan	L	P	L	P	L	P			
1	Balik Bukit	991	1026	21	21	1012	1047			
2	Sukau	282	256	28	44	310	300			
3	Lumbok	188	185	_	_	188	185			
	Seminung	100	103	_	_	100	103			
4	Belalau	236	230	-	-	236	230			
5	Sekincau	425	383	63	65	488	448			
6	Suoh	213	175	197	162	410	337			
7	Batu Brak	189	153	-	-	189	153			
8	Pagar Dewa	210	178	82	69	292	247			

9	Batu Ketulis	115	121	-	-	115	121
10	Bandar Negeri Suoh	244	222	148	167	393	389
11	Sumber Jaya	433	487	-	-	433	487
12	Way Tenong	506	563	-	-	506	563
13	Gedung Surian	285	298	-	-	285	298
14	Kebun Tebu	360	367	-	-	360	367
15	Air Hitam	205	184	-	-	205	184
Jum	lah	4882	3803026	539	528	4410012	4310047

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, 2014

Tabel 2.8. Distribusi Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Berdasarkan Status Per Kecamatan di Lampung Barat Tahun 2014

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Sekolah	Guru	Siswa	Sekolah	Guru	Siswa
1	Balik Bukit	1	43	467	1	16	71
2	Sukau				1	28	78
3	Lumbok						
	Seminung						
4	Belalau				1	21	116
5	Sekincau				1	26	226
6	Suoh				3	53	219
7	Batu Bak						
8	Pagar Dewa				1	18	48
9	Batu						
	Ketulis						
10	Bandar						
	Negeri				1	14	34
	Suoh						
11	Sumber				2	29	209
	Jaya				2	29	209
12	Way				5	97	569
	Tenong				3	91	309
13	Gedung						
	Surian						
14	Kebun				1	15	74
	Tebu				1		
15	Air Hitam				2	38	329
Jumlah		1	43	467	19	355	1973

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, 2014

Berdasarkan Tabel 2.8 Kecamatan Balik Bukit adalah satu-satunya kecamatan yang memiliki Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dengan 467 siswa.

Sedangkan Madrasah Tsanawiyah dengan status swasta hampir tersebar ke semua kecamatan di Lampung Barat, hanya empat kecamatan yang tidak memiliki yaitu Lumbok Seminung, Batu Brak, Batu Ketulis, dan Gedung Surian. Di mana jumlah siswa MTs Swasta tahun 2014 mencapai 1973 siswa. Jumlah siswa terbanyak ada di wilayah Kecamatan Way Tenong yang mencapai 569 siswa, sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan 34 siswa.

Tabel 2.9. Distribusi Siswa MTs Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014

NT.	17	Negeri		Swasta		Jumlah	
No	Kecamatan	L	P	L	P	L	P
1	Balik Bukit	206	261	36	35	242	296
2	Sukau			33	45	33	45
3	Lumbok						
	Seminung						
4	Belalau			67	49	67	49
5	Sekincau			103	123	103	123
6	Suoh			109	110	109	110
7	Batu Brak						
8	Pagar Dewa			23	25	23	25
9	Batu Ketulis						
10	Bandar Negeri Suoh			15	19	15	19
11	Sumber Jaya			111	98	111	98
12	Way Tenong			292	277	292	277
13	Gedung						
	Surian						
14	Kebun Tebu			43	31	43	31
15	Air Hitam			145	184	145	184
Jumlah		206	261	977	996	1183	1257

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, 2014

2.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Lampung Barat

2.3.1. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan Tabel 2.10 Angka Partisipasi Sekolah pada usia SD/MI (7-12 Tahun) mengalami penurunan dari tahun 2010 ke 2013 yaitu 98,70 ke 98,26. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan di Kabupaten Lampung Barat di usia tersebut semakin meningkat. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah pada usia SMP/MTs (13-15 Tahun) mengalami peningkatan

dari tahun 2010 ke 2013 yaitu 83,09 ke 88,10. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan di Lampung Barat di usia tersebut semakin rendah.

Tabel 2.10. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lampung Barat

Angka Partisipasi Sekolah	2010	2013
7-12 Tahun	98,70	98,26
13-15 Tahun	83,09	88,10

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, 2014

2.3.2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai, maka diperlukan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk usia sekolah di suatu jenjang pendidikan dengan jumlah siswa dengan usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya dikalikan dengan 100 sedangkan untuk mengetahui banyaknya anak bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan daerah diperlukan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka ini diperoleh dari perbandingan penduduk usia di suatu jenjang pendidikan dengan siswa keseluruhan di suatu jenjang pendidikan dikalikan 100. Berikut adalah Tabel data APM dan APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Lampung Barat:

Tabel 2.11. Angka Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat

Jenjang Pendidikan	APM (%)	APK (%)
SD/MI	93,67426	106,52
SMP/MTs	72,6358	94,55

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, 2014

Berdasarkan Tabel 2.11. pada jenjang pendidikan SD/MI memiliki APM 93,67426 % yang menunjukkan bahwa banyak anak usia sekolah tingkat SD/MI yang bersekolah di Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan APK pada jenjang pendidikan SD/MI juga sangat tinggi dengan APK lebih dari 100 %, yaitu 106,52 % yang menandakan bahwa banyaknya siswa yang sekolah di Lampung Barat. Hal ini dapat dimungkinkan karena adanya siswa yang berasal dari luar

Kabupaten Lampung Barat atau adanya siswa yang belum memasuki usia jenjang SD/MI namun sudah bersekolah di SD/MI. Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs memiliki APM 72,6358 % yang menunjukkan bahwa banyak anak usia sekolah tingkat SMP/MTs yang bersekolah di Kabupaten Lampung Barat sedangkan APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs juga sangat tinggi dengan APK 94,55% yang menandakan bahwa banyaknya siswa yang bersekolah di Lampung Barat. Selain itu, dapat dilihat dari Tabel 12 bahwa baik APM maupun APK dari jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs selalu mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan banyaknya siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs dibandingkan jenjang pendidikan SD/MI. Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI lebih tinggi dibandingkan APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs yaitu 93,67426 % berbanding 72,6358 %. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak anak usia sekolah pada jenjang SD/MI yang bersekolah di Kabupaten Lampung Barat Sedangkan APK pada jenjang pendidikan SD/MI juga lebih tinggi dibandingkan APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs yaitu 106,52 berbanding 94,55.

BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

3.1 Visi dan Misi Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Barat

Untuk merumuskan visi dan misi pendidikan dasar Kabupaten Lampung Barat, diperlukan analisis mendalam terkait rencana strategis pendidikan nasional, tantangan pembangunan pendidikan di era globalisasi, dan capaian kinerja pendidikan. Perumusan visi dan misi pendidikan dasar Lampung Barat dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi pendidikan nasional, pemerintah daerah provinsi Lampung, pendidikan provinsi Lampung, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat, dan pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Perumusan visi pendidikan dasar Lampung Barat pada dasarnya harus (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat; (b) merupakan arah dan fokus strategi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat; (c) sebagai orientasi masa depan seluruh jajaran organisasi Kabupaten Lampung Barat; (d) diharapkan mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi Kabupaten Lampung Barat; (e) membentuk satu ikatan dan menjamin kesinambungan kepemimpinan Kabupaten Lampung Barat;

A. Visi Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Barat

Sejalan dengan visi pendidikan nasional 2025 yakni menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) dan visi pendidikan kabupaten Lampung Barat yakni terwujudnya pendidikan yang berkarakter, unggul, dan berdaya saing, maka visi pembangunan pendidikan dasar Kabupaten Lampung Barat menuju 2025 yang relevan adalah: "Pada Tahun 2025, Terwujudnya Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Barat Berkarakter dan Berdaya Saing Nasional Demi Terbentuknya Insan Cerdas yang Berakhlak Mulia".

Untuk lebih memperjelas arah yang dituju, maka perlu diuraikan makna dari visi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat tersebut sebagai berikut: (a) terwujudnya mutu pendidikan sekarang akan menjamin terwujudnya SDM yang cerdas, unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia, (b) kedepan yang diinginkan, mewujudkan pendidikan yang bermutu di semua jenjang dan jalur pendidikan, (c) untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberdayakan organisasi dan stakeholder pendidikan dalam peran serta pengelolaan pendidikan, (d) Untuk mewujudkan mutu pendidikan bermutu dan berdaya saing, para stakeholders harus

mampu berkreatif, inovatif dalam menghadapi tantangan yang menghambat terwujudnya mutu pendidikan.

Visi yang dimaksud merupakan hasil integrasi dari beberapa kata esensial yang menggambarkan dua arahan pembangunan pendidikan dasar Kabupaten Lampung Barat yakni (a) kualitas pendidikan dasar dan (b) kualitas produk pendidikan dasar yang diharapkan.

1. Kualitas Pendidikan Dasar

Kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan faktor penting yang harus segera direalisasikan demi terwujudnya insan cendikia yang berdaya saing global. Kualitas pendidikan dasar Kabupaten Lampung Barat yang diharapkan adalah terwujudnya pendidikan dasar yang berkarakter dan berdaya saing.

Pendidikan Dasar yang Berkarakter

Pendidikan dasar yang berkarakter mengacu suatu sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Adapun karakter-karakter mulia yang ingin ditanamkan pada peserta didik pada tingkat pendidikan dasar meliputi: cinta kepada Allah dan ciptaann-Nya (alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, cinta persatuan, dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas

Karakter merupakan bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak". Karakter mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti "to mark" atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut denganberkarakter mulia.

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhatihati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka, tertib. Karakteristik adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku).

Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya).

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakterkepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai "the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development". Dalampendidikan karakter di sekolah,semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah atau lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter.

Menurut David Elkind & Freddy Sweet Ph.D. (2004), pendidikan karakter dimaknai sebagai berikut: karakter adalah segala sesuatu yang dilakukanguru, yang mampu mempengaruhikarakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.

Menurut T. Ramli (2003), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi

anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu,hakikat dari pendidikan karakterdalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pedidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai the golden rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak darinilai-nilai karakter dasar tersebut. Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar tertentu, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat pembentukan kepribadian meningkatkan peranannya dalam peserta didik melaluipeningkatan intensitas dankualitas pendidikan karakter.

Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upayapeningkatan pendidikan karakterpada jalur pendidikan formal. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka tentang pendekatan dan modus pendidikannya. Berhubungan dengan pendekatan, sebagian pakar menyarankan penggunaan pendekatan-pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di negaranegara barat, seperti: pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, dan pendekatanklarifikasi nilai. Sebagian yang lain menyarankan penggunaan pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman nilai-nilai sosial tertentu dalam diri peserta didik.

Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.

Setelah kita amati, Nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan

mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP). Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu: rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan.

Pendidikan Dasar yang Berdaya Saing

Dewasa ini, entah disadari atau sekadar latah, hampir dalam setiap wacana mutu pendidikan kita muncul gagasan tentang pentingnya daya saing. "Mewujudkan bangsa yang berdaya saing" malah menjadi misi kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Atas dasar itu, Kemdikbud merumuskan visi Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005-2025, "Menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif". Istilah daya saing sejatinya berusaha mengekstrapolasi konsep-konsep seleksi alam (natural selection dan survival of the fittest). Paham ini kemudian melahirkan "ideologi kekuatan" yang sebelum Perang Dunia II memacu perlombaan senjata dan perkembangan kapitalisme sebagai upaya bangsa-bangsa untuk sintas dalam alam yang konkuren.

Sekarang, istilah daya saing seperti jadi obsesi dalam merespons globalisasi. Globalisasi telah menjadikan dunia sebagai arena dan pasar terbuka yang dalam perspektif konkurensi ditafsir seolah hanya untuk bertarung dan saling mengalahkan. Padahal, sebenarnya globalisasi juga membuka peluang "bersulang" atau berbagi dan saling bekerja sama atas dasar mutualisme, kesederajatan, dan saling percaya. Bagi Pemerintah Indonesia, sebagaimana tertera dalam RPJPN, berdaya saing tinggi adalah

kunci tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Pembangunan sumber daya manusia harus diarahkan pada pengembangan kemampuan kompetitif yang tinggi (tentunya) menurut ukuran-ukuran global. Hanya dengan daya saing tinggi Indonesia akan siap dan mampu bertahan menghadapi tantangan-tantangan global.

Pemahaman mengenai pentingnya daya saing bangsa, muncul dan berkembang seiring dengan semakin berkembangnya globalisasi dan perdagangan dunia. Berkaitan dengan itu, Hatten dan Resenthal (2000:5) menyatakan bahwa penguasan bidang ilmu dan teknologi dalam kadar yang memadai sangat diperlukan agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan kreativitas, pengembangan, dan penerapan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) sebagai tuntutan yang mutlak dalam kehidupan global. Menurut Harrison dan Huntington (Subandowo, 2009:109). Era globalisasi telah merubah paradigma yang sangat besar dalam sektor produktivitas yang menyangkut kekayaan suatu negara. Pada masa lampau kekayaan suatu negara dipandang berkait erat dengan sumber-sumber kekayaan alam yang dimiliki. Akan tetapi untuk ukuran sekarang, kekayaan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang mampu mengubah sumber-sumber daya alam itu menjadi produk atau jasa yang berharga berdasarkan ilmu pengetahuan, investasi, gagasan, dan inovasi. Banyak sumber daya alam atau eksternal yang dulu menguntungkan suatu negara kini telah hilang karena arus perkembangan globalisasi.

Konteks baru dalam peningkatan daya saing antarbangsa dewasa ini adalah kebutuhan untuk mengetahui segala perubahan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan penguasaan yang memadai bidang ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, tidak heran jika berbagai bangsa dapat kita saksikan sangat antusias berlomba dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, termasuk menciptakan, mengembangkan, dan menggunakannya dalam rangka mencapai kesuksesan yang kompetitif. Bagi suatu bangsa maupun organisasi bisnis, penguasaan ilmu pengetahuan baru sangat penting artinya untuk dapat berpartisipasi dalam era global. Pihak yang pantas menjadi pemenang dalam persaingan global adalah mereka yang mengetahui (knowing) bagaimana cara bertahan hidup dan mengetahui bagaimana mengembangkan kemampuan berorganisasi (Hatten dan Rosenthtal, 2000:7). Dalam kaitan ini, pendidikan merupakan unsur penting yang harus mendapat prioritas utama. Dalam kerangka itulah, pendidikan diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan seutuhnya setiap orang, baik jiwa, raga, intelijensi, kepekaan, estetika, tangung jawab, dan nilai-nilai spiritual.

Melalui pendidikan, setiap orang hendaknya dapat diberdayakan untuk berpikir mandiri dan kritis. Dalam dunia yang terus berubah dan diwarnai oleh inovasi sosial dan ekonomi, pendidikan tampak sebagai salah satu kekuatan pendorong untuk meningkatkan kualitas imajinasi dan kreativitas sebagai ungkapan dari kebebasan manusia dan standarisasi tingkah laku perorangan. Kesempatan atau peluang perlu diberikan kepada generasi muda untuk melakukan percobaan dan menemukan sesuatu yang baru (UNESCO, 1996:94).

2. Kualitas Produk Pendidikan Dasar

Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk menghasilkan produk pendidikan yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Terbentuknya Insan Cerdas yang Berakhlak Mulia

Produk yang diharapkan dari penyelenggaraan pendidikan dasar Kabupaten Lampung Barat adalah dihasilkannya insan cerdas yang berakhlak mulia. Mutu pendidikan di Indonesia, menurut pendapat sebagian pengamat pendidikan kita, tidak meningkat, bahkan cenderung menurun. Salah satu indikatornya adalah menurunnya sikap dan perilaku moral para lulusan pendidikan kita yang semakin hari cenderung semakin jauh dari tatanan nilai-nilai moral yang dikehendaki. Untuk mengantisipasi persoalan semacam itu pendidikan kita perlu diperhatikan dengan serius, misalnya dengan direkonstruksi ulang agar dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan siap menghadapi "dunia" masa depan yang penuh dengan problema dan tantangan serta dapat menghasilkan lulusan yang memiliki sikap dan perilaku moral yang mulia (Marzuki, 2008).

Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan seperti di atas, para peserta didik (siswa dan mahasiswa) harus dibekali dengan pendidikan khusus yang membawa misi pokok dalam pembinaan akhlak mulia. Pendidikan seperti ini dapat memberi arah kepada para peserta didik setelah menerima berbagai ilmu maupun pengetahuan dalam bidang studi (jurusan) masing-masing, sehingga mereka dapat mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat dengan tetap berpatokan pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang universal.

Keluarnya undang-undang tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), yakni UU no. 20 tahun 2003, menegaskan kembali fungsi dan tujuan pendidikan nasional kita. Pada

pasal 3 UU ini ditegaskan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan mengemban misi yang amat mulia dalam pembangunan bangsa ini. Tentu saja semua mata pelajaran selain dua mata pelajaran itu juga bersama-sama memiliki misi tersebut secara terintegratif.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk perbaikan pendidikan adalah membangun kultur akhlak mulia di kalangan siswa. Kultur akhlak mulia dapat diartikan sebagai kualitas kehidupan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilainilai akhlak mulia yang menghiasi sikap dan perilaku manusia dalam pengabdian hidupnya sehari-hari. Pengabdian ini tercermin dalam dua hubungan manusia, yakni hubungan dengan Sang Pencipta, Allah Swt. (hablun minallah), dan hubungan dengan sesama manusia (hablun minannas), bahkan dalam berhubungan dengan alam sekitarnya.

1. Konsep Akhlak Mulia

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq yang merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat (Hamzah Ya'qub, 1988: 11). Sinonim dari kata akhlak ini adalah etika dan moral. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawaih. Sedang al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada pikiran (Rahmat Djatnika, 1996: 27).

Mengkaji dan mendalami konsep akhlak bukanlah yang terpenting, tetapi merupakan sarana yang dapat mengantarkan seseorang pada pengamalan akhlak mulia. Dengan pemahaman yang jelas tentang konsep akhlak, seseorang akan memiliki pijakan dan pedoman untuk mengarahkan tingkah lakunya sehari-hari, sehingga ia memahami apakah yang dilakukan benar atau tidak, termasuk akhlak mulia atau akhlak tercela.

Kecenderungan manusia pada kebaikan terbukti dalam kesamaan konsep pokok akhlak pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan perilaku pada bentuk dan penerapan yang

dibenarkan Islam merupakan hal yang ma'ruf (Shihab, 1996: 255). Tidak ada peradaban yang menganggap baik seperti tindak kebohongan, penindasan, keangkuhan, dan kekerasan. Sebaliknya tidak ada peradaban yang menolak keharusan menghormati kedua orangtua, keadilan, kejujuran, dan pemaaf sebagai hal yang baik. Namun demikian, kebaikan yang hakiki tidak dapat diperoleh melalui pencarian manusia dengan akalnya saja. Akhlak telah melekat dalam diri manusia secara fitriah. Dengan kemampuan fitriah ini ternyata manusia mampu membedakan batas kebaikan dan keburukan, dan mampu membedakan mana yang tidak bermanfaat dan mana yang tidak berbahaya (al-Bahi, 1975: 347).

Ruang lingkup akhlak mulia, secara umum akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mulia dan akhlak tercela (buruk). Akhlak mulia adalah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sedang akhlak tercela adalah akhlak yang harus kita jauhi dan jangan sampai kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Islam ruang lingkup akhlak dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak terhadap Tuhan (Allah SWT.) dan akhlak terhadap makhluk (selain Allah Swt.). Akhlak terhadap makhluk masih dirinci lagi menjadi beberapa macam, seperti akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), serta akhlak terhadap benda mati.

2. Pembentukan Kultur Akhlak Mulia

Kata kultur terambil dari kata berbahasa Inggris, culture, yang berarti kesopanan, kebudayaan, atau pemeliharaan (Echols dan Shadily, 1995: 159). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kultur juga diartikan sama, yakni kebudayaan, pemeliharaan, atau pembudidayaan (Tim Penyusun Kamus, 2001: 611). Kata kultur sekarang mulai banyak dipakai untuk menyebut budaya atau kebiasaan yang terjadi, sehingga dikenal istilah kultur sekolah, kultur kantor, kultur masyarakat, dan lain sebagainya.

Untuk lebih memahami makna kultur dan sekaligus pembentukan kultur, perlu dijelaskan satu makna tentang kultur sekolah. Kultur Sekolah adalah tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut sekolah. Tradisi itu mewarnai kualitas kehidupan sebuah sekolah. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ditunjukkan dari yang paling sederhana, misalnya cara mengatur parkir kendaraan guru, siswa, dan tamu, memasang hiasan di dinding-dinding ruangan, sampai persoalan-persoalan menentukan seperti kebersihan kamar kecil, cara guru dalam pembelajaran di

ruang-ruang kelas, cara kepala sekolah memimpin pertemuan bersama staf, merupakan bagian integral dari sebuah kultur sekolah (Depdiknas RI, 2004: 11).

Dengan demikian kultur merupakan kebiasaan atau tradisi yang sarat dengan nilainilai tertentu yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan. Kultur dapat dibentuk dan dikembangkan oleh siapa pun dan di mana pun. Pembentukan kultur akhlak mulia berarti upaya untuk menumbuh-kembangkan tradisi atau kebiasaan di suatu tempat yang diisi oleh nilai-nilai akhlak mulia.

Pengalaman Nabi Muhammad membangun masyarakat Arab hingga menjadi manusia yang berakhlak mulia (masyarakat madani) memakan waktu yang cukup panjang. Pembentukan ini dimulai dari membangun aqidah mereka selama kurang lebih tiga belas tahun, yakni ketika Nabi masih berdomisili di Makkah. Selanjutnya selama kurang lebih sepuluh tahun Nabi melanjutkan pembentukan akhlak mereka dengan mengajarkan syariah (hukum Islam) untuk membekali ibadah dan muamalah mereka sehari-hari. Dengan modal aqidah dan syariah serta didukung dengan keteladanan sikap dan perilaku Nabi, masyarakat madani (yang berakhlak mulia) berhasil dibangun Nabi yang kemudian terus berlanjut pada masa-masa selanjutnya sepeninggal Nabi.

Michele Borba juga menawarkan pola atau model untuk pembudayaan akhlak mulia. Michele Borba menggunakan istilah membangun kecerdasan moral. Dia menulis sebuah buku dengan judul Building Moral Intelligence: The Seven Essential Vitues That Kids to Do The Right Thing, 2001 (Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi, 2008). Kecerdasan moral, menurut Michele Borba (2008: 4), adalah kemampuan seseorang untuk memahami hal yang benar dan yang salah, yakni memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga ia bersikap benar dan terhormat. adalah sifat-sifat utama yang dapat mengantarkan seseorang menjadi baik hati, berkarakter kuat, dan menjadi warga negara yang baik.

Bagaimana cara menumbuhkan karakter yang baik dalam diri anak-anak disimpulkannya menjadi tujuh cara yang harus dilakukan anak untuk menumbuknan kebajikan utama (karakter yang baik), yaitu empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan. Ketujuh macam kebajikan inilah yang dapat membentuk manusia berkualitas di mana pun dan kapan pun. Meskipun sasaran buku ini adalah anak-anak, namun bukan berarti tidak berlaku untuk orang dewasa, termasuk para siswa di SD. Dengan kata lain tujuh kebajikan yang ditawarkan oleh Michele Borba ini

berlaku untuk siapa pun dalam rangka membangun kecerdasan moralnya.

B. Misi Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Barat

Misi pendidikan dasar yang dirumuskan harus memberikan pelayanan yang menyakinkan masyarakat, memiliki daya saing, dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan. Adapun misi pendidikan dasar Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

- a. Akselerasi Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dasar berbasis IPTEK dan IMTAQ
- b. Meningkatkan jaminan perolehan layanan pendidikan dasar yang berkualitas;
- c. Akselerasi peningkatan kualitas tata kelola, manajemen, layanan pendidikan dasar yang ramah, transparan, dan akuntabel;
- d. Percepatan peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan karakter bangsa pada pendidikan dasar Kabupaten Lampung Barat
- f. Peningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru sekolah dasar

3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk merealisasikan visi dan misi Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2015-2025 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

3.1.1. Tujuan Strategis

Tujuan strategis yang hendak dicapai hingga tahun 2015-2025 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas nasional 2025. Adapun tujuan stategis tersebut adalah sebagai berikut:

TS-1	Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar
TS-2	Tersedianya sistem tata kelola pendidikan dasar yang handal
	Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan dasar berbasis
TS-3	IPTEK dan IMTAQ yang berkualitas nasional, berkesetaraan, dan

	relevan dengan kebutuhan masyarakat
TS-4	Terwujudnya kesejahteraan dan profesionalisme guru sekolah
	dasar

Keterangan: TS = Tujuan Strategis

3.1.2. Sasaran Strategis

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah indikator sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai setiap kurun waktu. Indikator tersbut merupakan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan masterplan pendidikan secara keseluruahn. Adapun Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui mutu dan relevansi pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat
- Mengetahui berbagai potensi dan sarana pendukung upaya peningkatan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat
- Mengetahui faktor-faktor penghambat upaya peningkatan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat
- d. Mengetahui permasalahan prioritas yang akan dicarikan solusinya berkaitan dengan upaya peningkatan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat
- e. Adanya rumusan kebijakan strategis yang dapat dijadikan sebagai solusi alternatif dalam upaya peningkatan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat
- f. Mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan nyata bagi pendidikan dasar di Ka Kabupaten Lampung Barat
- g. Mendeskripsikan pemerataan dan perluasan pendidikan dasar di seluruh wilayah bagian Kabupaten Lampung Barat;
- h. Mendeskripsikan pemberdayaan peran serta orang tua dan masyarakat dan/atau Komite Sekolah.

Indikator ketercapaian dari setiap rumusan sasaran strategis dirangkum dalam beberapa tabel berikut:

a. Indikator sasaran strategis untuk mencapai **TS-1**

Sasaran Strategis	Baseline (2012)	2013-2014	2015-2019	2020-2022
APM SD/MI/Paket A	113,45%	Minimal 100%	Minimal 100%	Minimal 100%

APS Kelompok Usia 7-12 Tahun	113,45%	Minimal 100%	Minimal 100%	Minimal 100%
APK SMP/MTs/Paket B	104,23%	98%	105%	115%
APM SMP/MTS/SMPLB/Paket B/Sederajat	82,62%	85%	90%	100%
APS Kelompok Usia 13-15 Tahun	82,62%	85%	90%	100%
Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%
Angka Putus Sekolah: • SD • SMP Melanjutkan SD/MI/ Paket A ke SMP/MTs/	0,10% 0,29%	0,09% 0,25%	0,07% 0,15%	0,05% 0,10%
Paket B	106,09	Min. 100%	Min. 100%	Min. 100%
Angka Melanjutkan Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	98,8%	99,0%	99,5%	100%
SD/SDLB dan SMP/SMPLB diakreditasi;	100%	100%	100%	100%
Terakreditasi minimal B; SD/SDLB SMP/SMPLB	91% 82%	93% 85%	95% 90%	100% 95%
Melaksanakan e- pembelajaran: SD/SDLB				
· SMP/SMPLB	15% 27%	30% 50%	60% 80%	90% 95%
SD SBI atau RSBI;	0,1%	10%	25%	50%
SMP SBI atau RSBI;	0,2%	10%	40%	75%
Guru SD/SDLB Kualifikasi S-1/D-4 Bersertifikat ;	49,9% 48,73%	55% 54%	79% 80%	90% 100%
Guru SMP/SMPLB Kualifikasi S-1/D-4 Bersertifikat ;	78,76% 56,53%	98% 90%	100% 95%	100% 100%
Rasio pendidik: peserta didik § SD 1:20 sd 1:28 § SMP 1:20 sd 1:32	90% 85%	92% 90%	95% 95%	98% 98%

b. Indikator sasaran strategis untuk mencapai **TS-2**

Sasaran Strategis	Baseline (2012)	2013-2014	2015-2019	2020-2022
Audit laporan keuangan	Wajar Tanpa Pengecualia n (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualia n (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualia n (WTP)	Wajar Tanpa Pengecuali an (WTP)

c. Indikator sasaran strategis untuk mencapai **TS-3**

Sasaran Strategis	Baseline (2012)	2013-2014	2015-2019	2020-2022
Satuan pendidikan anak usia dini formal menerapkan sistem pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan toleransi) dan menyenangkan bagi anak	80%	90%	100%	100%
Tersedianya sarana multimedia dan TIK lengkap penunjang pembelajaran di SD/MI dan SMP/MTs	80%	90%	100%	100%
Rintisan sekolah dasar gratis dalam mendukung wajib belajar 12 tahun	80%	90%	100%	100%
Menyelenggarakan standar pelayanan minimal SPM pendidikan dasar yakni:∖ • menyediakan buku teks bagi para pelajar; • menyediakan 100 buku pengayaan dan 10 buku referensi bagi sekolah dasar, serta 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi bagi sekolah menengah pertama, dan; • mengakomodir tidak lebih dari 32 murid perkelas untuk tingkat SD/MI, dan 36 murid per-kelas untuk tingkat SMP/MTs.	80%	90%	100%	100%

Terbentuknya unit penelitian	80%	90%	100%	100%
dan evaluasi pendidikan				
dasar untuk pendidikan				
berbasis penelitian (reseach-				
based education)				

d. Indikator sasaran strategis untuk mencapai **TS-4**

Sasaran Strategis Sasaran Strategis	Baseline (2012)	2013-2014	2015-2019	2020-2022
Tunjangan sertifikasi guru sekolah dasar	80%	90%	100%	100%
Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran	80%	90%	100%	100%
Penguasaan kompetensi professional guru: • penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, • penguasaan terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya	80%	90%	100%	100%
 Penguasaan kompetensi pedagogi guru Pemahaman guru terhadap peserta didik, Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan\ pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya 	80%	90%	100%	100%
 Penguasaan kompetensi kepribadian guru: keterlibatan guru dalam acara keagamaan di sekolah keterlibatan guru dalam pembinaan kegiatan siswa kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia 	80%	90%	100%	100%

Penguasaan kompetensi sosial guru:	80%	90%	100%	100%
 keterlibatan guru dalam kegiatan sosial masyarakat keterlibatan guru dalam komite sekolah dan koordinasi wali murid 				

BAB IV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015-2025

Berdasarkan analisis visi, misi, dan tujuan strategis pembangunan pendidikan yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dengan tetap memperhatikan kesepakatan internasional mengenai pengembangan pendidikan, khususnya gerakan pendidikan untuk semua (Education For All Movement) dan hasil evaluasi capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat, maka dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dasar tahun 2015-2025. Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2015-2025 dirumuskan untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan dasar berikut cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis. Program-program yang dirumuskan harus cukup efektif untuk mencapai sasaran pendidikan dasar selama kurun waktu 10 tahun .Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas 2025. Kebutuhan tersebut mencakup pembelajaran dan penilaian (learning and assessment), pendidik dan tenaga kependidikan (educators and educational staff), pendanaan pendidikan (educational funding), sarana dan prasarana (infrastructure), dan tata kelola (management system).

4.1. Strategi Pencapaian Tujuan

suatu bentuk merupakan Strategi atau rencana yang sistematis mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan suatu institusi, antisipasi terhadap perubahan dalam lingkungan, serta berbagai ancaman yang mungkin dari luar. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan institusi, kesenjangan antarwilayah, gender, serta antar unit satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat. Keseluruhan faktor eksternal perlu dipertimbangkan agar stategi-stategi yang dikembangkan dapat secara efektif diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan.

4.1.1. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 1 (TS 1)

Tujuan strategis TS-1, yaitu terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- (1) Perumusan peraturan daerah (PERDA) wajib belajar dikdas bagi masyarakat Lampung Barat
- (2) Pemberian beasiswa pendidikan dasar bagi masyarakat Lampung Barat
- (3) Penyuluhan sadar pendidikan dasar secara masif bagi masyarakat Lampung Barat
- (4) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dasar berkualitas
- (5) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran pendidikan dasar non formal berkualitas
- (6) Peningkatan kesadaran masyarakat yang mendukung terwujudnya harmonisasi antara sekolah dan masyarakat
- (7) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, *parenting education* serta;
- (8) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem *community learning* yang profesional

4.1.2. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 2 (TS-2)

Tujuan strategis TS-2, yaitu tersedianya sistem tata kelola pendidikan dasar yang handal, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- (1) Penguatan garis haluan dan langkah kerja dan sistem kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
- (2) Penguatan sistem penganggaran dan perencanaan pendidikan dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
- (3) Penguatan sistem pendataan SDM pendidikan dasar dan keadaan sosial ekonomi masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
- (4) Penguatan fungsi pengontrolan internal (*internal controlling system*) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat

4.1.3. Strategi Pencapaian Tujuan Strategi 3 (TS-3)

Tujuan strategis TS-3, yaitu tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan dasar berbasis IPTEK dan IMTAQ yang berkualitas nasional, berkesetaraan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- (1) Penyediaan sarana prasarana lengkap pendukung penyelanggaraan pendidikan dasar
- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs
- (3) Pembangunan fasilitas peribadatan bagi seluruh SD/MI dan SMP/MTs
- (4) Pemberian beasiswa sekolah lanjut bagi guru-guru pendidikan dasar
- (5) Pembentukan unit pengawasan dan evaluasi pembelajaran bagi pendidikan dasar

4.1.4. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 4 (TS-4)

Tujuan strategis TS-4, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan profesionalisme guru sekolah dasar, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- (1) Pemberian insentif bagi guru berprestasi
- (2) Penyediaan sarana prasarana pendidikan
- (3) Peningkatan kapasitas/konten keilmuan guru dengan pelatihan/bimbingan teknis bagi guru sekolah dasar
- (4) Pelatihan pengelolaan kelas secara berkala bagi guru
- (5) Penyediaan klinik konsultasi guru pendidikan dasar
- (6) Penguatan program *lesson study* bagi guru-guru pendidikan dasar ke luar daerah

4.2. Strategi Umum

Dari seluruh strategi pencapaian pembangunan pendidikan dasar dapat dikelompokkan ke dalam strategi umum beberapa komponen sistem pendidikan sebagai berikut:

A. Komponen Pembelajaran dan Penilaian

Rumusan strategi umum pencapaian pendidikan dasar untuk komponen pembelajaran dan penilaian adalah sebagai berikut:

- 1. Penyediaan sistem pembelajaran dan penilaian (*learning and assessment system*) pada satuan pendidikan dasar yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
- 2. Penyediaan data dan informasi serta akreditasi pendidikan dasar yang handal

B. Komponen Pendanaan

Rumusan strategi umum pencapaian pendidikan dasar untuk komponen pendanaan adalah sebagai berikut:

- 1. Pemberian subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dasar berkualitas yang merata diseluruh kecamatan
- 2. Pemberian subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran yang berkualitas

C. Komponen Sarana dan Prasarana

Rumusan strategi umum pencapaian pendidikan dasar untuk komponen sarana dan prasarana adalah penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar berkualitas diseluruh kecamatan

D. Komponen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rumusan strategi umum pencapaian pendidikan dasar untuk komponen pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

- 1. Perekrutan pendidik dan tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar yang berkualitas.
- 2. Penyediaan manajemen satuan pendidikan dasar yang berkualitas

E. Komponen Tata Kelola

Rumusan strategi umum pencapaian pendidikan dasar untuk komponen tata kelola adalah sebagai berikut:

- 1. Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis pendidikan dasar berkualitas
- Penguatan akuntabilitas sistem keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
- Penguatan akuntabilitas pengelolaan aset milik negara di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
- 4. Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat

4.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dibuat dengan memperhatikan strategi umum pembangunan

pendidikan dasar Kabupaten Lampung Barat 2015-2025. Hubungan strategi umum dan arah kebijakan pendidikan dasar adalah sebagai berikut:

Penyediaan sistem pembelajaran dan penilaian berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan

Penyediaan data dan informasi pendidikan dasar yang handal Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang berkualitas

Penyediaan manajemen pendidikan dasar berkompeten yang berkeadilan Penyediaan tenaga pendidik berkompeten pada jenjang pendidikan dasar

Pengembangan metode dan strategi pembelajaran berbasis inkuiri yang mendukung ketercapaian kompetensi peserta didik baik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomorik

Pembaruan (update) data dan informasi pendidikan dasar Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan

Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik

Pengembangan dan penerapan penilaian autentik dalam pendidikan dasar Keterpaduan sistem database dan informasi pendidikan dasar

Penguatan Penguatan akuntabilitas Penataan struktur Penguatan akuntahilitas akuntabilitas organisasi untuk sistem pengelolaan aset meniamin sistem keuangan di pengawasan milik negara di lingkungan Dinas internal di tercapainya tujuan lingkungan Dinas Pendidikan lingkungan Dinas dan sasaran Pendidikan Kabupaten Pendidikan strategis Kabupaten pendidikan dasar Lampung Barat Kabupaten **Lampung Barat** Lampung Barat Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi

Gambar 4.1. Bagan Hubungan Strategi Umum (kotak warna) dan Arah Kebijakan (Kotak Tidak Berwarna)

4.3.1. Penerapan Metodologi Pendidikan Akhlak Mulia dan Berkarakter

Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan *soft skills* yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara;
- (3) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran aktif di lapangan;
- (4) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter berbangsa dan bernegara
- (5) Melakukan kajian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan peserta didik sedini mungkin.

4.3.2. Keterpaduan Sistem Evaluasi Pendidikan

Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan system evaluasi pendidikan yang terpercaya. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari indeks integritas sekolah. Untuk meningkatkan nilai indeks integritas sekolah, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan dan pengawasan Ujian Sekolah jenjang pendidikan dasar yang kredibel dan berintegritas;
- (2) Penyempurnaan substansi Ujian Sekolah yang mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik meliputi aspek penilaian kognitif, afektif dan psikomotor;
- (3) Penyempurnaan sistem pemrosesan hasil Ujian Sekolah;
- (4) Penyusunan sistem yang menjamin keterpaduan hasil Ujian Sekolah dengan Ujian Nasional.

4.3.3. Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Pendidikan Dasar

Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan

akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan. Penerapan TIK untuk pendidikan dasar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dapat memperluas keterjangkauan pendidikan dasar, serta sekaligus penguatan tata kelola.

Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global berdampak pada semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, meningkatnya kebutuhan untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan TIK, serta perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi. Kondisi di atas menuntut diberlakukannya kebijakan di bidang TIK.

Penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, e-manajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan perluasan e-pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar
- (2) Pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan publik.
- (3) Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk mempermudah dalam berbagi informasi dan pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik;
- (4) Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK pada pendidikan dasar dan menengah;
- (5) Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK di sekolah dasar.

4.3.4. Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Selain tenaga pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi kepala sekolah adalah lemahnya kompetensi manajerial, sedangkan yang dihadapi pengawas sekolah adalah lemahnya kompetensi kepengawasan.

Secara khusus, kepala sekolah dasar menghadapi permasalahan tingginya beban kerja karena tidak mempunyai tenaga administrasi sekolah. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

(1) Pemberian beasiswa S-2 bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah;

- (2) Penyelenggaraan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah;
- (3) Revitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS;
- (4) Penyediakan tenaga administrasi sekolah di setiap sekolah dasar.

4.3.5. Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik

Undang-Undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan guru dan dosen sebagai profesi. Guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik, sedangkan dosen harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-2/S-3 dan bersertifikat pendidik.

Pemerintah harus menyelesaikan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik selambat-lambatnya pada akhir tahun 2014. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2010-2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat akan mempertahankan kebijakan-kebijakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru yang antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan sistem rekrutmen guru berkualifikasi S1/D4 yang berkompeten;
- (2) Pemberian beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi S-1/D-4 dan peningkatan kualifikasi dosen menjadi S-2/S-3;
- (3) Peningkatan pembinaan profesionalisme guru berkelanjutan melalui kegiatan KKG/MGMP.

4.3.6. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan inti dari berbagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi sangat diperlukan sejalan dengan tanggung jawab yang semakin besar karena harus mengelola anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD. Reformasi birokrasi dilaksanakan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- (1) Restrukturisasi organisasi yang mendukung visi dan misi Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dasar;
- (2) Penyempurnaan tata laksana;
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (4) Pengembangan sistem pengukuran dan remunerasi berbasis kinerja;
- (5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

4.4. Sasaran Strategis, Kebijakan Strategis, Program Prioritas serta Tahapan Pencapaian Tahunan Selama Tahun 2015-2025

Sasaran strategis, kebijakan strategis, program prioritas serta tahapan pencapaian setiap tahun selama tahun 2015-2025, dapat dilihat seperti pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Sasaran Strategis, Kebijakan Strategis, Program Prioritas serta Tahapan Pencapaian Visi dan Misi Pendidikan Tahun 2015-2025

Periode rencana	2015 – 2016	2017-2020	2021-2025		
Tema Pembangunan	Peningkatan dan enguatan kapasitas dan modernisasi	Daya Saing Regional	Daya Saing Internasional		
Visi Pendidikan	Menghasilkan Insan Kabupaten Lampung Barat Cerdas Berkelas Dunia 2022				
	1. Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Belajar	1. Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Belajar	Perluasan dan pemerataan Kesempatan Belajar		
	a. Pemberian biaya operasional pendidikan (BOS) yang disertai dengan pembinaan dan pengendalian berlanjut	a. Peningkatan Pemberian BOS yang disertai dengan pengendalian yang berke-lanjutan	a. Peningkatan Pemberian BOS yang disertai dengan pengendalian yang berke-lanjutan		
Sasaran strategis	b. Pemanfaatan secara optimal e-TV, internet, dan perangkat ITC lainnya sebagai media pembelajaran dan sarana belajar alternatif (pendidikan jarah jauh)	b. Pemanfaatan secara optimal e-TV, internet, dan perangkat ITC lainnya sebagai media pembelajaran dan sarana belajar alternatif (pendidikan jarah jauh)	b. Pemanfaatan secara optimal e-TV, internet, dan perangkat ITC lainnya sebagai media pembelajaran dan sarana belajar alternatif (pendidikan jarah jauh)		
	c. Siswa yang kurang mampu secara ekonomi dan yang memasuki program keahlian berbasis keunggulan potensi daerah berbeasiswa	c. School come to client, sekolah mendatangi siswa, khususnya untuk wilayah miskin.	c. School come to client, sekolah mendatangi siswa, khususnya untuk wilayah miskin		

d. Pendidikan terselenggara secara gotong royong antara masyarakat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, termasuk dalam hal pembangunan unit sekolah baru	d. Investasi pembangunan sarana pendidikan efisien dan pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah ada melalui penyelenggaraan sekolah terpadu optimal	d. Investasi pembangunan sarana pendidikan efisien dan pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah ada melalui penyelenggaraan sekolah terpadu bertaraf regional optimal
e. Terbentuk "SD-SMP satu atap" dan menambahkan ruang belajar SMP di SD untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya	e. Terdapat perhatian secara khusus terhadap kesejahteraan gender.	e. Terdapat perhatian secara khusus terhadap kesejahteraan gender.
f. Terdapat perluasan akses bagi anak usia 7 – 15 tahun melalui jalur non formal atau program pendidikan terpadu/inclusif bagi anak – anak	f. Komunikasi informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat terlaksana dengan baik	f. Komunikasi informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat terlaksana dengan baik
g. Terdapat perluasan akses terhadap pendidikan di SD/MI DAN SMP/MTS sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal	g. Terdapat perluasan akses terhadap pendidikan di SD/MI DAN SMP/MTS sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal	g. Terdapat perluasan akses terhadap pendidikan di SD/MI DAN SMP/MTS sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal
h. Terdapat perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup	h. Terdapat perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup	h. Terdapat perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan bidun

2. Peningkatan Mutu dan relevansi pendidikan.	2. Peningkatan Mutu dan relevansi pendidikan.	2. Peningkatan Mutu dan relevansi pendidikan.
a. Mutu pendidikan meningkat sesuai standar internasional > 75%	a. Mutu pendidikan meningkat sesuai standar internasional > 90%	a. Mutu pendidikan bertaraf regional
b. Kompetensi guru meningkat yang ditandai dengan > 75% berijazah Si dan memperoleh sertifikasi		b. Kompetensi guru berstandar regional
c. Kualitas MBS meningkat.	c. Kualitas manajemen berbasis sekolah meningkat.	c. Kualitas MBS Regional
d. Kualitas siswa dan sekolah meningkat secara signifikan	d. Kualitas siswa dan sekolah meningkat secara signifikan	d. Kualitas siswa dan sekolah bertaraf regional
e. Terdapa penghargaan yang riil ata t prestasi	e. Terdapat penghargaan yang riil atas prestasi	e. Terdapat penghargaan yang riil atas prestasi tingkat regional
f. Kegiatan inovasi peningkatan fasilitat pendidikan/pembelajaran da n peningkatan kompetensi guru bersubsidi	fasilitas pendidikan/pembelajaran dan peningkatan	f. Kegiatan inovasi peningkatan fasilitas pendidikan/pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru bersubsidi
g. SNP sesuai dengan PP no. 19 tahun 2005 tentang SNP dikembangkan	g. SNP sesuai dengan PP no. 19 tahun 2005 tentang SNP dikembangkan	g. SNP sesuai dengan PP no. 19 tahun 2005 tentang SNP dikembangkan
h. Evaluasi pendidikan dilaksanakar melalui ujian sekolah oleh sekolah dan ujian nasional yang dilakukar oleh sebuah badan yaitu BSNP	h. Evaluasi pendidikan dilaksanakan melalui ujian sekolah oleh sekolah	h. Evaluasi pendidikan dilaksanakan melalui ujian sekolah oleh sekolah dan ujian nasional yang dilakukan oleh sebuah badan yaitu BSNP

i. Penjaminan mutu dilaksanakan	i. Penjaminan mutu dilaksanakan i. Penjaminan mutu
melalui proses yang sistematis	melalui proses yang sistematis dilaksanakan
	melalui proses vang sistematis
j. Terlaksana akreditasi satuan dan/atau	
program pendidikan untuk	dan/atau program dan/atau program pendidikan
menentukan status akreditasi masing	pendidikan untuk menentukan status
– masing.	untuk menentukan akreditasi masing – masing.
	status akreditasi masing – masing
k. Pemanfaatan secara optimal Radio,	k. Pemanfaatan secara optimal k. Pemanfaatan secara optimal
TV, internet dan perangkat ICT	Radio, TV, internet dan perangkat Radio, TV, internet dan
lainnya sebagai media pembelajaran	ICT lainnya sebagai media perangkat ICT lainnya
dan sarana belajar alternatif	pembelajaran dan sarana belajar sebagai
(pendidikan jarak jauh).	alternatif (pendidikan jarak jauh). media
	nembelajaran dan sarana belajar

3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik	3. Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik	3. Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik
a. Pemanfaatan ICT secara optimal untuk meningkatkan layanan pendidikan	a. Pemanfaatan ICT secara optimal untuk meningkatkan layananpendidikan	a. Pemanfaatan ICT secara optimal untuk meningkatkan layanan pendidikan
b. Program pendidikan anak usia dini berjalan dengan baik, optimal dan dikelola dengan baik	-	b. Program pendidikan anak usia dini bertaraf nasional berjalan dengan baik

	Drogram Waith Palaiar Dandidikan	a Draggem Waith Palaigr Dandidikan	c. Program Wajib Belajar
C		ž ž	5 3
	Dasar 9 Tahun tuntas dan dikelola	Dasar 12 Tahun tuntas dan	Pendidikan Dasar 12 Tahun
	sesuai aturan dan baik	dikelola sesuai aturan dan baik	tuntas dan dikelola sesuai
			aturan dan baik
d	l. Program Pendidikan Menengah	d. Program Pendidikan	d. Program Pendidikan Menengah
	berjalan dengan baik, optimal dan	Menengah berjalan	bertaraf regional berjalan
	dikelola dengan baik, transparan dan	dengan baik	dengan baik
	akuntabel		
e	e. Program Pendidikan non formal	e. Program Pendidikan non formal	e. Program Pendidikan non formal
	berjalan dengan baik, optimal dan	berjalan dengan baik	bertaraf regional berjalan
	dikelola dengan baik, transparan dan	-	dengan baik
	akuntabel		
f.	. Efisiensi Manajemen Pendidikan	f. Efisiensi Manajemen Pendidikan	f. Efisiensi Manajemen
	meningkat	meningkat	Pendidikan bertaraf regional
			meningkat

Periode rencana	2012 – 2014	2015-2019	2020-2022
Tema Pembangun an	Peningkatan dan Penguatan kapasitas dan modernisasi	Daya Saing Regional	Daya Saing Internasional

	4.	Perluasan dan pemerataan	4. Perluasan dan pemerataan	4.	Perluasan dan pemerataan
	a.	Terus mengupayakan keberlanjutan program pemberian biaya operasional pendidikan (BOS) sampai jenjang SD/MI dan SMP/MTS disertai dengan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian yang tertib dan akurat	kesempatan belajar a. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan (TV pendidikan)	a.	kesempatan belajar pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan (TV pendidikan)
Kebijak an Strategi	b.	Memperbanyak pemberian beasiswa serta subsidi – subsidi lainnya khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi dan pemberian beasiswa bagi siswa yang memasuki program keahlian	b.Memperbanyak implementasi program school come, to client, sekolah mendatangi siswa, khususnya untuk wilayah miskin melalui mobile training unit (MTU) dan sebagainya	b.	Memperbanyak implementasi program school come, to client, sekolah mendatangi siswa, khususnya untuk wilayah miskin melalui mobile training unit (MTU) dan sebagainya
S	c.	Pembiayaan penyelenggaraan secara gotong royong antara masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat, termasuk pembangunan unit sekolah baru.	c. Efesien investasi pembangunan sarana pendidikan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah ada melalui penyelenggaraan sekolah terpadu	c.	Efesien investasi pembangunan sarana pendidikan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah ada melalui penyelenggaraan sekolah terpadu
	d.	Membentuk SD-SMP satu atap, dan menambah ruang belajar.	d. Memperlihatkan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan untuk layanan khusus dan seienisnya	d.	Memperlihatkan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan untuk layanan khusus dan seienisnya

e. Memperluas akses bagi anak usia 7 – 15 tahun melalui jalur nonformal atau program pendidikan terpadu/inklusif bagi anak – anak berkebutuhan khusus	e. Melaksanakan komunikasi, informas, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat	e.Melaksanakan komunikasi, informas, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat
f. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun keatas melalui jalur pendidikan non formal	f. Memanfaatkan secara optimal sarana radio, televisi, komputer, dan perangkat ITC lain sebagai media pembelajar dan sarana belajar alternatif	f. Memanfaatkan secara optimal sarana radio, televisi, komputer, dan perangkat ITC lain sebagai media pembelajar dan sarana belajar alternatif
g. Memperluas akses terhadap pendidikan di SD/MI DAN SMP/MTS sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal h. Memperluas daya tampung perguruan tinggi, khususnya yang bertitik berat pada program – program politeknik, vokasi dan profesi	g. Memperluas akses terhadap pendidikan di SD/MI DAN SMP/MTS sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan h. Memperluas daya tampung perguruan tinggi, khususnya yang bertitik berat pada program – program politeknik, vokasi dan profesi	g. Memperluas akses terhadap pendidikan di SD/MI DAN SMP/MTS sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan h. Memperluas daya tampung perguruan tinggi, khususnya yang bertitik berat pada program – program politeknik, vokasi dan profesi
i. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup.	i. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup.	j. Meningkatkan kualitas pendidikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan

5. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan	5. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan	5. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
Mengupayakan peningkatan kompetensi guru dibuktikan dengan sertifikasi standar nasional	Mengupayakan peningkatan kompetensi guru dibuktikan dengan sertifikasi standar nasional	Mengupayakan peningkatan kompetensi guru dibuktikan dengan sertifikasi standar nasional

•	Perbaikan sarana dan prasarana	•	Perbaikan sarana dan prasaran	•	Perbaikan sarana dan prasarana
•	Pembinaan manajemen sekolah	•	Pembinaan manajemen sekolah	•	Pembinaan manajemen sekolah
•	Penyelenggaraan lomba dan	•	Penyelenggaraan lomba dan	•	Penyelenggaraan lomba
	kompetisi antar sekolah secara rutin		kompetisi antar sekolah secara		dankompetisi antar sekolah
•	Pemberian penghargaan yang riil	•	Pemberian penghargaan yang riil	•	Pemberian penghargaan yang
	atas prestasi		atas prestasi		riil atas prestasi
•	Pemberian subsidi untuk kegiatan	•	Pemberian subsidi untuk kegiatan	•	Pemberian subsidi untuk
	inovasi maupun peningkatan		inovasi maupun peningkatan		kegiatan inovasi maupun
	fasilitas pendidikan/ pembelajaran		fasilitas pendidikan/ pembelajaran		peningkatan fasilitas
	serta peningkatan dan sertifikasi		serta peningkatan dan sertifikasi		pendidikan/ pembelajaran
	kompetensi guru		kompetensi guru		serta peningkatan dan
•	Pengembangan sekolah berbasis	•	Pengembangan sekolah berbasis	•	Pengembangan sekolah berbasis
	keunggulan		keunggulan lokal		keunggulan lokal
•	Penerapan telematika dalam	•	Penerapan telematika dalam	•	Penerapan telematika
	pendidikan		pendidikan		dalampendidikan
•	Melaksanakan penjaminan mutu	•	Melaksanakan penjaminan mutu	•	Melaksanakan penjaminan mutu
	melalui suatu proses analisis yang		melalui suatu proses analisis yang		melalui suatu proses analisis
	sistematis terhadap hasil ujian		sistematis terhadap hasil ujian		yang sistematis terhadap hasil
	nasional dan hasil evaluasi lainnya		nasional dan hasil evaluasi lainnya		ujian nasional dan hasil evaluasi
	baik antara satuan kabupaten.		baik antara satuan kabupaten.		lainnya baik antara satuan
	-		-		kahunaten

Melaksanakan akreditasi satuan daratau program pendidikan untumenentukan status akreditasi Perluasan Pendidikan kecakapan hidup Implementasi SNP Pembangunan sekolah bertaraf nasional disetiap kecamatan Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah		Melaksanakan akreditasi satuan dan atau program pendidikan untuk menentukan status Perluasan Pendidikan kecakapan hidup Implementasi SNP Pembangunan sekolah bertaraf nasional disetiap Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah
6. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencintraan Publik • Program pendidikan anak usia dini	6. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencintraan Publik • Program pendidikan anak usia dini	6. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencintraan Publik • Program pendidikan anak usia dini
Program wajib belajar 12 dasar tahunProgram pendidikan menengah	 Program wajib belajar 12 dasar tahun Program pendidikan menengah	Program wajib belajar 12 dasar tahunProgram pendidikan menengah
 Program pendidikan non formal Peningkatan efesiensi manajemen pendidikan 	Program pendidikan non formal Peningkatan efesiensi manajemen pendidikan	Program pendidikan non formal Peningkatan efesiensi manajemen pendidikan
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran
Peningkatan kapasitas dan komptensi managerial aparat	Peningkatan kapasitas dan komptensi managerial aparat	Peningkatan kapasitas dan komptensi managerial aparat
Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang – undangan	Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang – undangan	Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang – undangan
Penataan regulasi pengelolaan pendidikan	Penataan regulasi pengelolaan pendidikan	Penataan regulasi pengelolaan pendidika

	Peningkatan kecitraan publik	Peningkatan kecitraan publik	Peningkatan kecitraan publik

BAB V. PENUTUP

Pembangunan pendidikan merupakan proses pembanguan masyarakat ekonomi. Critical mass yang dapat dicapai dalam pembangunan pendidikan akan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam proses produksi dan distribusi sehingga akan memberikan sumbangan pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Upaya meningkatkan pendidikan rata-rata penduduk akan meningkatkan kemapuan penerapan teknologi sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja dan pada giliranya akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Meningkatkan pendidikan rata-rata penduduk akan menambah jumlah konsumen produk barang dan jasa yang mempunyai kandungan teknologi, sehingga akan memacu produksi dan distribusi sehingga pada gilirannya akan meningkatkan proses produksi akan mendorong peluang untuk meningkatkan kemampuan mereka menjadi produksi teknologi, sehingga memacu produksi dan apda gilirannya meningkatkan kesejahteraan penduduk. Meningkatnya pendidikan rata-rata penduduk akan meningkatkan kegiatan distribusi dan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan peduduk.

Untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologiu duperlukan juga suatu lapisan penduduk dengan mutu pendidikan yang lebih tinggi daripada tingkat pendudukan rata—rata penduduk. Peningkatan mutu pendidikan dan wawasan keunguulan merupakan landasan utama pembangunan pendidikan. Dengan demikian, pembangunan pendidikan memerlukan upaya peningkatan pendidikan rata—rata penduduk dan juga peningkatan mutu pendidikan suatu lapisan masyarakat yang mampu menguasai teknologi canggih. Meningkatnya kesejahteraan penduduk akan ditandai oleh bergesernya struktur produksi atau struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan ke sektor jasa yang lebih canggih lagi. Pergeseran struktur ekonomi ini akan disusu dengan berlangsungnya pergeseran struktur tenaga kerja sehingga mereka yang bekerja di sektor pertaian akan bergeser bekerja di sektor industri. Pergeseran struktur tenaga kerja ini perlu didukung oleh pergeseran struktur pendidikan karena meningkatnya tingkat pendidikan rata—rata penduduk dan mutu pendidikan akan menunjang atau mempercepat pergeseran struktur tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan sektor jasa yang lebih canggih.

Wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun digerakkan untuk menunjang terbentuknya keseimbangan dinamis antara pembangunan pendidikan dan pembangunan pendidikan dan pembagunan masyarakat ekonomi. Upaya pelaksanaan wajib belajar tingkat SLTP+MTs ini perlu terus digiatkan. Melihat

kemampuan kemajuan pada tahun – tahun yang lalu dan kemampuan di masa depan agaknya target penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun (wajib belajar SLTP+SMP) akan dapat dicapai pada tahun 2010 lalu.

Mutu pendidikan ditingkatkan melalui beberapa cara. Melengkapi buku, alatalat laboratorium, perpustakaan, dan sarana pendidikan lainnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan. Melengkapi jumlah dan meningkatkan kemampuan guru, termasuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah untuk mengelola sekolah, merupakan suatu cara lain untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Mutu pendidikan dapat ditingkatkan juga melalui quality control untuk menjamin lulusan yang baik (mutu output) dan quality untuk menghindari lulusan yang tidak memenuhi standar minimum (mutu proses). Relevansi pendidikan dengan berkebutuhan pembangunan perlu lebih disesuaikan lagi. Pembangunan berlangsung sangat cepat membawa berbagai perubahan di segala bidang. Pendidikan harus juga bisa mengantisipasi perubahan—perubahan tersebut dan menyesuaikan diri dengan perubahan—perubahan tersebut pada saat yang tepat.

Strategi penuntasan wajib belajar pendidikan 12 tahun tidak dapat dilakukan menggunakan strategi tunggal yang berlaku umum untuk semua lapisan masyarakat. Strategi pendidikan harus mempertimbangkan keanekaragaman keadaan berbagai lapisan masyarakat.

Pada garis besarnya heterogenitas lapisan—lapisan masyarakat tersebut dapat dikelompokkan dalam empat kelompok: (1) kelompok masyarakat memiliki aspirasi pendidikan yang tinggi dan pendapatan tinggi; (2) kelompok masyarakat memiliki aspirasi dan pendapatan rendah; (3) kelompok masyarakat memiliki aspirasi pendidikan yang rendah dan pendapatan tinggi. (4) kelompok masyarakat memiliki aspirasi pendidikan yang rendah dan pendapatan yang rendah. Strategi pendidikan atau penuntasan wajib belajar bagi satu kelompok akan berbeda dari kelompok lain. Operasionalisai strategi tersebut mencakup langkah—langkah sebagai berikut: (1) mengadakan pemetaan sasaran; (2) meningkatkan partisipasi dan koordinasi unit — unit pelaksanaan seperti pamong desa, tokoh — tokoh masyarakat, dan usahawan; (3) melaksanakan sosialisasi secara tepat; (4) mengembangkan sistem insentif; (5) meningkatkan pengendalian atau monitoring pelaksanaan wajib belajar; dan (6) memanfaatkan teknologi untuk menuntaskan pelaksanaan wajib belajar. Disamping itu diperlukan mobilisasi dana secara nasional.

Pendidikan masih menghadapi berbagai kendala yang perlu dihilangkan agar pendidikan menjadi berkualitas. Wawasan keunggulan untuk meningkatkan kemampuan bersaing perlu dijadikan pedoman dalam peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu pada level kelas proses belajar perlu ditingkatkan dengan meningkatkan motivasi guru untuk mengajar dengan baik dan usaha keras agar siswa mampu mencapai hasil yang terbaik dari dirinya. Pada level sekolah perlu diciptakan iklim yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang baik, kemampuan dan inisiatif kepala sekolah untuk mengelola sekolahnya sebagai suatu unit pendidikan yang tangguh merupakan faktor yang sangat perlu didorong kerjasama yang lebih erat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat agar mereka lebih peduli dan memperhatikan kemajuan siswa, guru dan sekolahnya.

Meningkatkan pendidikan rata-rata penduduk, mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan akan meningkatkan proses pembangunan masyarakat ekonomi sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat lebih tinggi lagi. Dengan demikian, berbagai tantangan yang mempunyai skala luas dan sulit dibayangkan di masa depan, seperti terbukanya perdagangan bebas ASEAN tahun 2003, komunitas ASEAN 2015, perdagangan bebas asia fasifik (APEC) tahun 2010 dan perdagangan bebas dunia tahun 2020, akan dapat dihadapi. Serta, dilaksanakan secara operasional mulai pada unit pendidikan paling ujung yaitu pada tempat belajar mengajar, melalui upaya peningkatan kemampuan murid, peningkatan mutu guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan unit terdepan dalam pendidikan.